



KEKERASAN OLEH APARAT NEGARA

16 DAYS OF ACTIVISM AGAINST GENDER-BASED VIOLENCE
16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
16 JOURS D'ACTIVISME CONTRE LA VIOLENCE DE GENRE
25 NOV - 10 DEC <http://16dayscwgl.rutgers.edu>



Militerisme negara (lihat lembar berjudul "Apakah Militerisme itu?") berkembang karena dijunjungnya maskulinitas berbasis kekerasan, yang mendorong laki-laki untuk secara stereotipe berperilaku macho sementara perempuan berperilaku mengalah dan taat. Dengan terbaginya masyarakat sosial menjadi dua seperti ini, siapa pun yang berani menantang serta mempertanyakan seperangkat norma-norma ini seperti mengundang bahaya bagi diri mereka sendiri. Ini mempengaruhi keamanan perempuan, laki-laki dan anak-anak, serta membiarkan munculnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti perkawinan anak dan perkawinan paksa serta kurangnya kemandirian ekonomi serta pendidikan perempuan.



Kekerasan oleh aparat negara terjadi pada masa konflik maupun pada masa damai, dan negara melakukan pembenaran akan meningkatnya militerisme dan agenda politik yang mengambil berbagai wujud tapi semuanya berakibat sama.

Negara menggunakan terminologi gender dalam pernyataan "demi melindungi ibu pertiwi", untuk mendukung dan membenarkan pembiayaan negara buat berbagai senjata dan basis militer, pelanggaran terhadap kebebasan masyarakat sipil, serta mempraktekkan tidak transparannya badan-badan negara. Kekerasan dilakukan oleh aparat negara maupun yang bukan aparat negara seperti tentara nasional, tentara PBB untuk penjaga keamanan, milisia, tentara semi-militer, maupun kelompok-kelompok pribadi. Kekerasan tersebut terjadi di ranah publik maupun pribadi, di dunia online maupun dunia nyata, di kamp-kamp pengungsi, kantor polisi, penjara, dan di lingkungan militer.

Kesenjangan yang diakibatkan oleh hirarki politik dan ekonomi

Advokasikan Diakhirinya Impunitas

Libatkan para pembuat kebijakan yang mau mendengar dan yang bekerja di tingkat lokal, nasional, dan regional, maupun badan PBB serta badan internasional yang berpengaruh lainnya untuk membuat diprioritaskannya penghapusan kekerasan berbasis gender dan menggunakannya sebagai tolok ukur pembangunan nasional.

Dokumentasikan dan publikasikan contoh-contoh pelanggaran terhadap para pembela HAM, jurnalis, kelompok adat dan yang terpinggirkan. Bagikan informasi tentang pelanggaran HAM secara lokal dan internasional, dan tuntutan keadilan dari pemerintah yang berpengaruh, baik lewat mekanisme peradilan di tingkat lokal maupun internasional.

Bangun Kesadaran

Tulislah tentang penyebaran kekerasan berbasis seksual dan gender, serta bagaimana para korban, komunitas, dan aparat negara mengatasi atau tidak mengatasi isu ini. Ini diperlukan agar ada kesadaran baik di tingkat lokal maupun internasional, serta untuk menyingkirkan stigma kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. Berbicaralah di media umum (koran, radio, dan televisi) serta gunakan media sosial (Facebook dan Twitter) untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum di tingkat lokal dan internasional tentang realita yang dihadapi oleh para perempuan pembela HAM dan aktivis di daerah Anda.

seringkali dilindungi oleh negara. Hirarki kekuasaan adalah elemen kunci dari "kekerasan terstruktur", dan seringkali didukung oleh kesenjangan dan diskriminasi berdasarkan usia, kelas/kasta, gender, ras/etnis, orientasi seksual, militerisme di dalam praktek penggunaan kekerasan untuk menanggulangi masalah politik, sosial dan ekonomi, baik di dalam negeri maupun di dalam hubungan internasional.

Perempuan yang tidak takut pada struktur sosial dan politik yang dipaksakan kepada mereka adalah individu yang perlu disegani oleh aparat negara maupun mereka yang bukan aparat negara. Para perempuan ini menantang struktur kekuasaan yang berkaitan dengan patriarki dan militerisme. Untuk alasan ini, para Perempuan Pembela HAM menghadapi berbagai penganiayaan, ancaman keamanan, termasuk kekerasan seksual dan kematian. Karena jenis kelaminnya, perempuan pembela HAM mengalami ancaman, kekerasan, dan kejahatan seksual.



Karena negara tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi dan menjamin hak asasi perempuan, para oknum non-pemerintah juga ikut-ikutan melakukan diskriminasi serta kekerasan berbasis gender dan seksual di dalam lingkup yang ada di bawah pengaruh mereka.

Saat oknum pemerintah bisa mendapatkan impunitas untuk suatu kejahatan, oknum non-pemerintah bisa menggunakan ini untuk membenarkan praktek-praktek kekerasan mereka terhadap perempuan, laki-laki, dan anak-anak karena mereka tahu bahwa cengkaman hukum dan keadilan tidak akan mencapai mereka.

Oknum non-pemerintah kadang-kadang digunakan oleh sebagian negara untuk memainkan peran sebagai tentara, dan bila pelanggaran hak asasi terjadi pelakunya seringkali tidak

diadili. Kerja sama antara oknum pemerintah, oknum di luar pemerintah maupun sektor swasta memastikan bahwa impunitas dari tuntutan bisa terus berlangsung di banyak tempat di dunia ini.

Kedamaian, keamanan, dan legitimasi dari kekuatan negara (baik lewat konfrontasi ataupun yang halus seperti memata-matai) didasarkan pada militerisme. Ini membuat negara menggunakan kekerasan atas penduduknya di dalam dan kadang di luar batas negara untuk menunjukkan kuasa dan otoritasnya. Untuk mengatasi ini diperlukan pergeseran dinamika gender dan penghapusan kekerasan yang mendasari sistem ini, termasuk investasi pada kedamaian yang dicapai tanpa cara konflik dan mekanisme keamanan. Ini menuntut adanya perubahan konsep dari keamanan negara ke keamanan manusia, dengan menjadikan kesetaraan gender dan hak asasi manusia sebagai dasarnya.



Militarisme dan impunitas harus berakhir, dan pemerintah harus bertanggungjawab untuk mengawasi dan mendukung kesetaraan serta hak asasi manusia.

Negara mempunyai peran untuk menjalankan tanggungjawabnya dalam menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku kekerasan. Mekanisme yang ada di tingkat

Memperkuat Upaya PPHAM

Ajak lingkungan dan komunitas di sekitar Anda untuk berbicara tentang hak asasi perempuan serta penggunaan kekerasan seksual terhadap aktivis. Mobilisasi mereka untuk menuntut pertanggungjawaban negara lewat mekanisme nasional, regional, dan internasional. Dekati komunitas-komunitas ini untuk secara kolektif berdiri di belakang para aktivis yang berhadapan dengan kekerasan oleh oknum negara maupun non-negara. Perkuat upaya para PPHAM lewat komunikasi, saling berbagi informasi, dan dokumentasi atas kejadian-kejadian kekerasan yang terjadi baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Dorong laki-laki untuk memainkan peran dalam mendukung diakhirinya kekerasan terhadap aktivis perempuan oleh oknum negara. Caranya, minta mereka hadir di dalam mars, demonstrasi, dan kegiatan publik lainnya. Bila ada laki-laki yang ragu untuk bergabung, bantu mereka untuk melihat manfaat yang akan dirasakan masyarakat apabila kekerasan seksual dan yang berbasis gender oleh individu, kelompok, maupun oknum negara bisa berakhir.

nasional, regional, dan internasional harus membuat oknum pemerintah maupun non-pemerintah bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dari semua penduduknya.

Sumber-sumber

Melibatkan Pembuat Kebijakan

- Alat-alat dari DCAF tentang Gender dan Reformasi Sektor Keamanan: <http://www.dcaf.ch/Series-Collections/Gender-Tools-and-Resources>
- Prosedur Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Keluhan Individu di bawah Perjanjian Hak Asasi Manusia: <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#proceduregenerale>
- Laporan Khusus tentang Promosi dan Perlindungan Hak Berpendapat dan Berekspresi: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx>

Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM)

- Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang PPHAM: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/68/L.64/Rev.1
- Inisiatif Perempuan Pembela HAM : <http://www.awid.org/Our-Initiatives/Women-Human-Rights-Defenders>
- Front Line Defenders. (2005) "Protection Manual for Human Rights Defenders" <http://www.frontlinedefenders.org/manuals/protection>

Organisasi Terkait

- Committee to Protect Journalists: <https://www.cpj.org>
- Human Rights Watch: <http://www.hrw.org>
- Women Peacemakers Program: www.womenpeacemakersprogram.org
- Women Under Siege: <http://www.womenundersiegeproject.org>
- Women Human Rights Defenders International Coalition: <http://defendingwomen-defendingrights.org>

Kampanye

- Hari Pengakhiran Impunitas: <http://daytoendimpunity.org>
- Kuasai Kembali Teknologi: <https://www.takebackthetech.net>